

DINAMIKA PELAKSANAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (*FREE TRADE ZONE*) BATAM

Dr.Khairul Anwar,M.Si dan Nofri Yanti
Email: Vie.kimbum@yahoo.com
Jurusan Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Pemerintahan- Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Binawidya Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax (0761)-632777

Abstract:

Free Trade Zone and Free Port of Batam regulated in Law No. 46 of 2007. Region free trade and free port of Batam This provides convenience to the investors to invest in Batam customs fee exempt investors to export or import activities. The existence of strategic. Batam city makes more and more in coming to the investors. The arrival of investors in Batam certainly bring a change in the city of Batam both in terms of physical and non-physical development. With the policy of free trade zone and free port of Batam certainly provide a lot of jobs to the community and to improve economic growth, as well as the determination of the Batam Free Trade Zone and Free Port Batam also resulted in dependence on other countries

Keywords: Free Trade Zone and economic growth

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Batam yang merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki lahan yang luas, cadangan air bersih, tenaga kerja dan ke- ragaman budaya serta stabilitas politik keamanan. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki kekhususan secara geografis. Karena berbatasan dengan

Negara tetangga sehingga merupakan pintu masuk lintas batas diantara Indonesia, singapura, dan Vietnam. Wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan daerah perairan merupakan daerah lintas Kepulauan dan negara-negara yang menjadi lintasan strategis jalur perekonomian, perdagangan, pariwisata, industri dan investasi. Dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah Batam

inilah maka Pemerintah Pusat Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang menyangkut dan membahas persoalan penetapan kawasan Kepulauan Riau (Bintan, Batam dan Karimun) sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas atau yang biasa di sebut dengan *Free Trade Zone (FTZ)* yaiyu UU No. 44 Tahun 2007. *Free Trae Zone (FTZ)* adalah kawasan yang berada di luar daerah kepabeanan suatu negara yang daerah tersebut merupakan daerah komersil yang ditujukan untuk kawasan perdagangan. Dalam kawasan *Free Trade Zone (FTZ)* ini beberapa hambatan dari perdagangan seperti tariff dan kuota di hapuskan dengan tujuan mempermudah urusan birokrasi dan menarik investor-investor baru untuk berinvestasi di-kawasan *Free Trade Zone* .

Upaya menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam (*Free Trade Zone*) merupakan upaya legitimasi baru bagi pulau Batam untuk melanjutkan fungsi pulau Batam sebagai daerah industri yang berstandar internasional. Memasuki era globalisasi orang akan semakin terbiasa dengan kehadiran pasar bebas. Hal ini tidak mengherankan karena memang salah satu karakteristik globalisasi adalah memudarnya batas-batas wilayah kenegaraan secara ekonomi. Dalam jangka panjang pasar bebas akan membawa manfaat berupa arus perdagangan yang lebih lancer, pasar yang lebih luas serta skala ekonomi yang sedemikian besar

sehingga menghasilkan alokasi sumber daya rasional yang meningkatkan efisiensi. Globalisasi akan membentuk persaingan pasar internasional yang terbuka .Batam harus dapat mempersiapkan diri agar dapat menjadi salah satu pameran dalam perdagangan internasional tersebut.dengan pertumbuhan yang pesat dan keadaan Batam hingga saat ini, prospek Indonesia untuk dapat bermain dalam kancan inetnasional akan semakin besar. Dengan memanfaatkan lokasi Batam yang strategis pada jalur pelayaran yang ramai sekali di selat Malaka disertai fasilitas dan infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memadai, maka Batam dapat menjadi pusat ekspor Indonesia.Eksportir yang dilakukan dapat menggunakan momentum *Free Trade Zone* Batam untuk berinvestasi di Batam sebagai langkah awal dalam uaya menjangkau pasar dan persaingan global.

Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mensukseskan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) di kota Batam ini. Secara konseptual Sumber Daya Manusia (SDM) memang sangat mempengaruhi karena investasi yang masuk di pulau Batam ini merupakan invesatsi yang berupa industri yang membutuhkan keahlian bagi masyarakat yang ingin bekerja di dalam industri tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yg telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang di lakukan pemerintah kota Batam dalam pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) di kota Batam serta implikasinya bagi kota Batam ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal dan tindakan-tindakan apa saja yang di lakukan oleh pemerintah kota dalam dalam mensukseskan kebijakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) di kota Batam.

4. Kerangka Teori

Thetonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feudal Eropa yang menghasilkan kapitalisme. Negara – negara pinggir ini, setelah disentuh oleh kapitalis maju, akan bangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalisme maju. Thetonio Dos Santos menguraikan 3 bentuk keter-

gantungan, adapun bentuk ketergantungan itu adalah¹ :

1. Ketergantungan colonial
Terjadinya penjajahan dari negara pusat ke Negara pinggiran. Kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang mentah yang di butuhkan negara pusat. Sementara negara periferi(pinggiran) menjadi pasar dari barang-barang jadi negara-negara pusat. Hubungan penjajahan penduduk sekitar bersifat eksploitatif.
2. ketergantungan finansial industrial
Negara pinggiran merdeka tetapi kekuatan finansialnya masih dikuasai oleh negara-negara pusat. Ekspor masih berupa barang-barang yang di butuhkan negara pusat. Negara periferi (pinggiran) dijanjikan akan penanaman modal bagi keberlangsungan industry yang pada akhirnya hanya menguntungkan negara-negara pusat.
3. Ketergantungan teknologis-industrialis
Bentuk ketergantungan yang kegiatan ekonomi di negara-negar pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Perusahaan multi-nasional mulai me-

¹ Yanuardi, M. Si Diktat mata kuliah Teori pembangunan. Hal 10

nanamkan modalnya di negara pinggir dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggir. Meskipun demikian teknologi dan patennya masih dikuasai oleh negara pusat.

4. Metode Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengusahaan Batam. dengan terfokus pada peran dari Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam. Dimana Batam akan dijadikan kawasan pusat investasi di kawasan Asia-Pasifik.

a. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu².

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan aparat pemerintah kota Batam khususnya yang secara langsung mengurus permasalahan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*Free Trade Zone*) di Batam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara menghimpun data atau pengambilan data.

Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik itu berupa buku, surat kabar (Koran), majalah, agenda, foto, dokumen dan lain sebagainya³.

3. Penelitian lapangan (observasi)

Penelitian lapangan dalam pengumpulan data merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dalam ruang terbuka, dimana kelompok yang diteliti masih bisa berhubungan dan berinteraksi dengan faktor-faktor luar.

b. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses penyederhana data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan⁴.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penulis menggunakan teknik analisis data triangulasi. Teknik analisis data triangulasi adalah mencocokkan (*Cross check*) antara hasil melihat dokumentasi dan wawancara dengan pendapat orang lain atau kajian pustaka serta observasi lapangan.

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensive terhadap suatu objek tertentu, setelah data dikumpulkan maka

²² Ibid Hal 48

³Lexy J Maleong. *Metode Penelitian kualitatif*. 1993 Hal. 47

⁴Burhan bungin. *Metode penelitian kualitatif*. 2001. Hal 74

diperlukan pengelompokan data menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang bersifat mendukung dan menganalisis data secara deskriptif (analisis yang menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan di lapangan) yang kemudian dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikir dan landasan teori yang relevan dalam penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mendapatkan kesimpulan seobjektif mungkin dengan kondisi di lapangan. Dengan analisa deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empiric yang ada secara mendalam.

B. ANALISA DAN PEMBAHASAN

a. Penyediaan Infrastruktur

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan terjadi interaksi didalam pelaksanaan demi terwujudnya pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan rencana. Selain itu didalam pelaksanaan suatu kebijakan suatu lembaga akan saling berkoordinasi antara lembaga yang satu dengan yang lainnya baik itu koordinasi secara vertical maupun secara horizontal. Batam dalam mewujudkan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas

8

Infrastruktur merupakan aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan suatu daerah secara lokal maupun nasional bahkan internasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai

dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) maka Badan Pengusahaan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga melakukan beberapa tahapan atau langkah demi terwujudnya visi dan misi dari Badan Pengusahaan Batam yaitu “ *terwujudnya daerah pusat industri yang bertaraf internasional*”. Penyediaan infrastruktur di kota Batam harus segera dilaksanakan oleh pemerintah untuk dapat memberikan ketertarikan kepada para investor menanamkan modalnya di kota Batam. pemerintah kota Batam khususnya Badan Pengusahaan Batam dalam hal ini mencanangkan beberapa program untuk melengkapi infrastruktur di kota Batam. adapun infrastruktur yang dibangun oleh Badan Pengusahaan Batam yang bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait lainnya yaitu:

1. Pembangunan perluasan dermaga utara Batu Ampar
2. Pengolahan Limbah.
- 3 Penyediaan air baku
- 4 Pengembangan E-Government.
- 5 Pembangunan Jalan Tol
- 6 Pengembangan Rel Kereta Api
- 7 Pembangunan pelabuhan *Transshipment* peti kemas TanjungSauh

salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.hal ini mengingatkan bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan ifrastruktur baik berupa transportasi,telekomunikasi dan lain-lain. Pencapaian pertumbuhan daerah yang terkendali dapat didukung

dengan terpenuhinya infrastruktur di daerah tersebut.

Kebijakan mengenai menjadikan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memerlukan sarana pendukung untuk menjadikan kebijakan itu layak untuk dikonsumsi oleh Masyarakat dan para investor. Infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya merupakan sarana utama dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam. dengan adanya sarana yang mendukung maka kebijakan menjadikan Batam sebagai kawasan pusat investasi akan berjalan sebagaimana yang telah dirumuskan sebelum pembuatan kebijakan tersebut.

Kelengkapan dari ketersediaan infrastruktur menjadi daya saing dan kebutuhan dasar didalam perihalan ekonomi. selanjutnya ketersediaan infrastruktur harus terus dikembangkan sejalan dengan pengembangan daerah yang berkedaulatan dan kaya akan tradisi. Pengembangan infrastruktur di Batam yang dijadikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) dalam pengembangan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar industry. Dengan adanya kelengkapan infrastruktur yang memadai maka konektivitas antar wilayah akan lebih efisien. Konektivitas antar wilayah yang efisien, kokoh dan terpadu menjadi dasar dari percepatan pembangunan wilayah nasional.

Pada umumnya kondisi infrastruktur di wilayah usulan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) masih belum memadai untuk dijadikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas (*Free Trade Zone*). jika wilayah yang dijadikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak mampu memberi pelayanan infrastruktur yang bertaraf internasional maka daerah itu dapat dikatakan gagal sebagai Kawasan pusat investasi pada suatu negara. Kelengkapan infrastruktur perlu diperhatikan karena pelayanan infrastruktur merupakan pertimbangan utama investor dalam menanamkan modal dan syarat utama dalam pengembangan kawasan. Se jauh ini pembangunan infrastruktur di kota Batam sudah mendekati tingkat mampu atau layak untuk dijadikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) yang menjadi pusat investasi di Asia-Pasifik sesuai dengan visi dan misi dari Badan Pengusahaan Batam yang dipercayakan sebagai lembaga yang mengatur jalannya kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam. Permasalahan infrastruktur tidak terlepas dari persoalan pendanaan, pendanaan merupakan permasalahan yang klasik di Indonesia di dalam mengembangkan kawasan termasuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) , apalagi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) ini akan dikembangkan dengan pelayanan yang bertaraf internasional. Sehingga dana yang dibutuhkan sangat besar. Untuk membantu permasalahan ini maka diperlukan kajian kebijakan tentang pola pendanaan untuk mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*). Dengan adanya rumusan kebijakan mengenai pola pendanaan akan menjadi acuan kelembagaan terkait didalam mengalokasikan dana dan investor dalam menanamkan modal.

Batam yang saat ini adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) telah banyak mengalami perubahan baik dalam segi pembangunan fisik ataupun nonfisik. Infrastruktur yang layak di Batam untuk dijadikan tempat investasi merupakan hal utama yang dijadikan para investor untuk menentukan sikap akan menanamkan sahamnya atau tidak. Dengan mempunyai infrastruktur yang layak maka investasi yang masuk ke kota Batam juga akan semakin besar. Kemudahan perizinan usaha dan penghapusan beberapa pajak juga menjadi faktor penting dalam banyaknya investasi yang masuk ke Batam. Kelengkapan infrastruktur kota Batam nantinya akan menjadi tombak bagi Batam agar dapat bersaing dengan kawasan lain yang memiliki kebijakan ekonomi sejenis dengan Batam. dampak dari pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) semakin Nampak dengan masuknya beberapa industry baru ke kota Batam.

Didalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam ada beberapa implikasi yang terjadi di kota Batam. adapun implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implikasi politik dari pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam.

Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) dalam wilayah Batam dapat kita nilai sebagai suatu kebijakan yang tepat sebagai wujud adanya interdependensi dalam dunia internasional karena perdagangan

bebas merupakan media yang paling efektif dan damai dalam peningkatan kekayaan masing-masing negara. Dalam perdagangan bebas secara alami negara-negara akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan yang komparatif (*Comparative Advantage*) dengan menjual komoditas tertentu yang tidak dimiliki oleh negara lain sehingga terjadi pasar dan perdagangan yang saling menguntungkan. Upaya berbagai negara dalam mendorong masuknya investasi dan perdagangan telah intensif dilakukan. Hal ini dilakukan salah satunya dengan mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) serta peningkatan kualitas kelembagaan baik berupa kebijakan yang intensif, peraturan yang memadai dan perlindungan terhadap investor luar negeri.

Didalam hal politik ketakutan yang sering terjadi terhadap arus masuk investasi asing merupakan ekspresi kekhawatiran bahwa kekuatan perekonomian perusahaan asing cepat atau lambat akan menguasai asset-asset kekuasaan nasional dan lapangan pekerjaan domestik sehingga pada akhirnya mereka akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat didalam perumusan-perumusan keputusan politik. Pada semua tingkatan pada kasus yang ekstrim mereka bahkan dapat (secara langsung menyuap para aktor pembuat kebijakan atau secara tidak langsung dengan cara memberikan sumbangan-sumbangan pada pembuat kebijakan setempat) mendiktekan suatu proses atau keputusan politik domestik yang sangat penting. Selain itu perusahaan-perusahaan asing seringkali menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi, menyuap, memanipulasi berbagai

kebijakan pemerintah di Batam yang tidak menguntungkan bagi daerah Batam.

Dalam menentukan kebijakan maka akan banyak sekali tekanan dan dorongan didalam penyusunan kebijakan. Banyak pihak yang dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan terlebih lagi peraturan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) ini menyangkut permasalahan dengan negara luar. Pemerintahan di negara berkembang masih memiliki begitu banyak tugas selain memicu pertumbuhan ekonomi yakni menyelenggarakan pelayanan publik, menyelaraskan prinsip-prinsip ideologi, mengatasi paham-paham kesukuan, serta mengintegrasikan golongan minoritas. Hampir semua pembuat kebijakan di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak mampu membuat kebijakan yang mandiri dan kompeten tanpa adanya pengaruh dari luar. Semakin banyak jumlah dan jenis perusahaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan akan semakin banyak memiliki banyak tekanan dan pertimbangan.

2. Implikasi Sosial dari Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*).

permasalahan dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang membuat kekhawatiran Batam akan bergantung kepada negara asing adalah permasalahan Tenaga kerja di Batam. seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyak Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Batam maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang disediakan.

Namun banyaknya lapangan kerja di Batam tidak serta merta menjadikan masyarakat di kota Batam menjadi sejahtera karena banyak dari perusahaan asing tersebut memperkerjakan warga negaranya di perusahaan-perusahaan yang mereka bangun di Batam.

Dampak- dampak yang dihasilkan dari beroperasinya dan berjalannya Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam pada proses pembangunan Batam dalam kenyataannya tidak merata dan bahkan dalam banyak hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan asing itu justru memperburuk distribusi pendapatan masyarakat daerah. Para pengusaha asing yang melakukan penanaman modal di Batam justru lebih mementingkan sejumlah kecil manajer di perusahaan yang kebanyakan adalah Warga Negara Asing. Disamping itu dengan banyaknya investasi asing yang masuk ke kota Batam menjadikan Batam sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat.

Kebijakan yang mendorong masuknya investasi dapat memacu dunia usaha yang tentunya akan berdampak pada lapangan kerja baru. Pembukaan lapangan pekerjaan tentunya akan berbanding lurus terhadap jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Untuk melihat penyerapan tenaga kerja di Batam dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Table 3.3
Perkembangan jumlah tenaga Kerja

No	TAHUN	WNI	WNA
1	2009	260.350	5.081
2	2010	288.318	5.108
3	2011	313.544	5.510
4	2012	330.592	5.970
JUMLAH			

Sumber : Badan Pengusahaan Batam

Dari Table diatas dapat kita ketahui bahwa setiap tahun baik tenaga kerja yang berasal dari Indonesia maupun tenaga kerja Asing selalu mengalami peningkatan. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Batam dalam memberikan izin kepada warga negara asing untuk bekerja di Batam membuat menjamurnya tenaga kerja asing yang datang ke Batam. Hal semacam inilah yang membuat persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di kota Batam. Keterbatasan skill yang dimiliki oleh masyarakat Batam membuat mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan. Untuk industri yang bertaraf ekspor tentunya mereka (para investor) akan menampung tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi untuk bekerja di perusahaan asing. Dominasi warga negara asing didalam menduduki posisi atas di perusahaan membuat masyarakat Batam harus rela bekerja sebagai buruh di perusahaan tersebut. Hampir setengah dari warga negara asing yang bekerja di Batam menduduki posisi atas di perusahaan Asing.

3. Implikasi ekonomi dari pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*).

Fakta perkembangan dan pertumbuhan Batam dapat dilihat dari

berbagai sisi, Ratusan perusahaan berbagai bidang baik dalam maupun luar negeri terus masuk dan berinvestasi di daerah ini. Seiring dengan itu Batam telah menjadi magnet bagi para investasi para pencari kerja.

Jumlah investasi yang masuk ke Batam saat ini telah menimbulkan adanya permintaan perubahan. Investasi yang masuk ke Batam merupakan investasi yang bernilai besar seperti industri perkapalan, elektronik, galian dan multimedia. Meningkatnya kegiatan industri kota Batam yang kebanyakan dilakukan oleh pihak swasta dan lebih banyak di klaim oleh negara asing. Batam yang menjadi bagian dari negara berkembang (dunia ketiga) merupakan sasaran utama bagi negara maju dalam melakukan investasi. Batam dari tahun 2009 mengalami peningkatan jumlah investasi. Pada tahun 2009 jumlah perusahaan yang berinvestasi di Batam sebanyak 525 perusahaan dan pada tahun 2012 jumlah perusahaan yang berinvestasi di Batam sebanyak 636 perusahaan. Untuk dapat melihat lebih jelas mengenai keadaan perusahaan di Batam dapat dilihat melalui table di bawah ini:

Tabel 3.5

Keadaan perusahaan di kota Batam

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	PMA	525	574	642	636
2	PMDN	437	516	617	603
Jumlah		962	1090	1258	1239

Sumber : Badan Pengusahaan Batam.

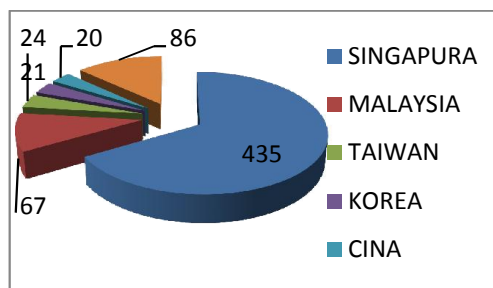
Banyaknya investasi yang masuk ke Batam akan meningkatkan investasi kota Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Namun hal semacam ini sama sekali tidak mengejutkan karena mengingat fakta sosial bahwa modal-Modal asing akan tertuju kepada negara-negara atau kawasan-kawasan yang menjanjikan tingkat pengembangan investasi dan kadar kepastian paling tinggi (tingkat resiko paling rendah). Berdasarkan teori dari pemikiran Dos Santos yang menyatakan bahwa negara-negara maju akan menanamkan modal mereka di negara-negara dunia berkembang dan hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya Batam. dengan melakukan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) maka ada ketergantungan Batam terhadap negara Asing mengenai finansial ataupun teknologi. Batam melakukan perjanjian ekonomi agar pertumbuhan ekonomi Batam dapat meningkat setiap tahunnya. Untuk melihat lebih detail mengenai jumlah perusahaan modal asing berdasarkan asal negara dapat dilihat melalui diagram berikut ini:

Sumber : Badan Pengusahaan Batam.

Penanaman modal (investasi) yang masuk ke Batam tentunya memiliki beberapa dampak positif terhadap daerah Batam itu sendiri. *pertama*, Penanaman Modal Asing (PMA) berkaitan dengan pembangunan di daerah tempat dia melakukan investasi. *Kedua*, masuknya investasi yang berasal dari negara asing membuat terjadi kesenjangan di bidang manajemen. Semangat kewirausahaan, teknologi industri dan keterampilan kerja yang diharapkan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh perusahaan-perusahaan swasta asing yang beroperasi di negara-negara berkembang yang bersangkutan. Perusahaan-perusahaan yang menanamkan investasi di kota Batam tidak hanya menyumbangkan modal (finansial) dan perusahaan-perusahaan baru saja kepada Batam yang bertindak sebagai daerah penampung investasi mereka. Akan tetapi mereka juga menyediakan suatu paket daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan termasuk didalamnya pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan serta keahlian di bidang teknologi.

Grafik 3.1

Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan asal negara



Batam yang dijadikan sebagai target investasi bagi negara maju yang dikarenakan letaknya yang strategis dan kondisi alam yang cukup memadai di tambah lagi dengan diberlakukannya kebijakan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam, secara ekonomis memang memiliki keuntungan tetapi kita perlu melihat kembali dan menelaah bagaimana implikasi dari hubungan ekonomi yang terjadi diantar Batam dengan negara asing tersebut. Perlu dipahami bahwa Penanaman Modal Asing (PMA)

menghasilkan kekhawatiran akan larutnya kita terhadap ketergantungan dengan negara lain. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) berpotensi besar untuk merusak perekonomian rumah tangga dimana tempat perusahaan asing itu berinvestasi. Hal ini terjadi dikarenakan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan asing dengan modal besar maka berpotensi besar untuk merusak perekonomian tuan rumah dengan cara menekan timbulnya semangat bisnis para wirausahawan lokal, dan menggunakan tingkat penguasaan pengetahuan dan teknologi mereka yang lebih unggul, jaringan hubungan luar negeri yang luas dan telah tertata dengan baik, keahlian dan keagresivitas dibidang periklanan serta penguasaan atas berbagai jasa pelengkap lainnya untuk mendorong keluar setiap perusahaan lokal yang cukup potensial ataupun tidak dan dapat mengganggu dan mengancam persaingan pasar dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan asing itu dapatmenghalangi munculnya perusahaan-perusahaan lokal yang berskala kecil yang berpotensi menjadi saingan mereka.

Bagi kebanyakan negara-negara berkembang seperti indonesia pilihan untuk tidak melakukan perdagangan atau hubungan ekonomi dengan luar negeri bukanlah suatu pilihan yang realistis. Terlepas dari setimpang apapun hubungan luar negeri itu. Setiap negara terutama Indonesia perlu melaksanakan hubungan luar negeri khususnya di bidang ekonomi.hal ini tidak hanya dikarenakan oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki namun juga dikarenakan peluang Batam untuk sekedar mempertahankan kelangsungan hidupnya pun tergantung kepada pasokan dari luar negeri. Jadi,

sebenarnya melakukan hubungan dengan negara lain adalah suatu hal yang pasti dilakukan oleh suatu negara atau daerah khususnya daerah pinggiran.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2007 yang berisi tentang ditetapkannya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) sudah banyak membawa perubahan baik bagi kota Batam maupun Indonesia. Pelaksanaan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam mempunyai tujuan yaitu agar pertumbuhan ekonomi di kota Batam dapat terus mengalami peningkatan dan dapat menjadi pusat investasi di Asia-Pasifik nantinya. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam pemerintah pusat telah menetapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam. dalam pelaksanaan kebijakan ini Badan Pengusahaan Batam banyak melakukan berbagai koordinasi agar pelaksanaan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Agar dapat bersaing dengan daerah lain yang mempunyai status yang sama dengan Batam maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kota Batam salah satunya adalah pengembangan pembangunan infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting didalam proses mempercepat proses pembangunan

ekonomi lokal maupun nasional. Selain itu ketersediaan infrastruktur yang lengkap di daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) menjadi daya saing dan kebutuhan dasar dalam hal ekonomi. Atas dasar itulah maka Badan Pengusahaan Batam melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga terkait melakukan pengembangan pembangunan infrastruktur.

Implikasi dalam hal politik, dalam pengambilan kebijakan akan banyak sekali tekanan dan dorongan. Banyak sekali pihak yang dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan terlebih lagi peraturan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) ini menyangkut permasalahan dengan luar negeri. Pemerintah merupakan pelaku yang secara aktif mempengaruhi kebijakan di dalam ruang lingkup industri. Pemerintah dapat membimbing pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) melalui koordinasi yang strategis untuk mendorong peningkatan nilai investasi. Namun di dalam penentuan kebijakan seringkali pemerintah menimbang kebijakan yang dilakukan oleh negara asing yang melakukan investasi di Batam. Dengan kata lain kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara pusat sangat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan di daerah tempat negara itu melakukan investasi.

Implikasi dalam hal ekonomi, investasi yang masuk ke Batam akan meningkatkan investasi kota Batam yang dijadikan sebagai Kawasan dan target investasi bagi negara asing dikarenakan letak Batam yang strategis dan kondisi alam yang cukup memadai ditambah lagi dengan diberlakukannya kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) secara ekonomis memang memiliki keuntungan tetapi kita perlu melihat kembali dan menelaah bagaimana implikasi dari hubungan ekonomi yang terjadi di antara Batam dengan negara asing tersebut. Perlu dipahami bahwa penanaman modal asing (PMA) menghasilkan kekhawatiran akan larutnya kita terhadap ketergantungan baik secara finansial maupun teknologi.

2. SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak dalam mendorong pelaksanaan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam. Maka dalam bagian ini penulis akan memberikan beberapa masukan yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan agar pelaksanaan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam dapat berjalan dengan baik. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Melengkapi ketersediaan infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang lengkap maka para investor akan banyak melirik Batam sebagai tujuan investasinya.
2. Para aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam menjalankan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) Batam harus lebih menjaga dengan koordinasi di antaranya.
3. Mempunyai aparatur pemerintah yang jelas dan tegas agar segala kebijakan yang dibuat atau akan dibuat

tidak mendapatkan
intervensi dari pihak luar
khususnya negara yang
melakukan investasi di kota
Batam.